

Judul : Perdagangan Karbon Butuh Regulasi Teknis
Tanggal : Sabtu, 20 Nopember 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Kejar Target Penurunan Emisi

Perdagangan Karbon Butuh Regulasi Teknis

INDONESIA memiliki potensi menjadi pasar utama karbon di dunia. Untuk itu, diperlukan peta jalan alias *roadmap* implementasi perdagangan karbon 2025. Ini menjadi poin utama dalam mendukung rencana pemerintah mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat menyampaikan paparan dalam *Kick Off* Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Bali, kemarin. Hadir di acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Pemberlakuan *carbon pricing* sesuai amanat Undang-Undang HPP disusun berdasarkan peta jalan pajak karbon yang telah dibahas oleh Komisi XI DPR dan pemerintah. Aturan perpajakan ini telah disahkan menjadi undang-undang," terang Dito.

UU HPP yang mengatur pajak karbon, lanjutnya, dilaksanakan secara bertahap sesuai *roadmap*. Hal ini memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian

target NDC, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.

Pelaksanaan UU ini juga mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan yang memperhatikan iklim usaha dan masyarakat kecil.

Selain itu, ada juga Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon sebagai landasan untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional.

Perpres ini menjadi landasan hukum pelaksanaan mekanisme penilaian ekonomi terhadap emisi Gas Rumah Kaca.

Melihat peluang yang ada, lanjutnya, dari sisi regulasi sampai implementasi, bursa carbon trading ada di Indonesia, bukan di luar negeri. Apalagi saat ini Indonesia menjadi Presidensi G20.

"Jadi, kami memberikan dukungan secara penuh kepada Pemerintah dan otoritas terkait untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan. Agar, bursa carbon trading ini dapat siap sesuai yang direncanakan oleh pemerintah," tambah Bendahara Umum Partai Golkar ini.



KICK OFF: Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Kick Off Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), di Bali, kemarin.

Dalam rangka mewujudkan bursa carbon trading domestik di Indonesia, lanjut Dito, pemerintah harus segera mempersiapkan regulasi teknisnya. Ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,

Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia selaku SRO (Self Regulatory Organization).

Dito bilang, perdagangan karbon dalam negeri akan memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian.

"Perdagangan karbon dalam negeri ini memiliki potensi yang besar untuk mencapai target penurunan emisi 29 persen pada tahun 2030. Juga, dalam jangka panjang menuju *Net Zero Emission* (NZE) paling lambat di tahun 2060," terang Dito. ■ KAL